



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2018

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Tahun Anggaran 2018 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah

Rp 137.656.958.127.41

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1). Belanja Pegawai	Rp	536.741.064.447,00
2). Belanja Bunga	Rp	0,00
3). Belanja Subsidi	Rp	549.450.000,00
4). Belanja Hibah	Rp	16.169.497.200,00
5). Belanja Bantuan Sosial	Rp	0,00
6). Belanja Bagi Hasil	Rp	3.717.537.401,00
7). Belanja Bantuan Keuangan	Rp	214.648.454.020,00
8). Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>4.605.729.738,00</u>
	Rp	776.431.762.806,00

b. Belanja Langsung :

1). Belanja Pegawai	Rp	53.908.523.840,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp	310.297.240.671,00
3). Belanja Modal	Rp	<u>177.443.446.126,00</u>
	Rp	541.649.210.637,00
Jumlah Belanja	Rp	1.318.080.973.443,00
(Defisit)	Rp	(71.721.361.316,19)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	75.721.361.316,19
b. Pengeluaran	Rp.	<u>4.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	71.721.361.316,19

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) Rp 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima alamat penerima dan

- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1.1 Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1.2 Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 7

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang telah ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 28 Desember 2017



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO


H. RIDWAN IS

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TANGGAL 28 DESEMBER 2017
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
 TAHUN ANGGARAN 2018

KABUPATEN BUNGO
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

No	GOLONGAN RUANG	ESELON					TENAGA FUNSIONAL			STAFF	JUMLAH
		I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
1.1	Golongan IV/e	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1.2	Golongan IV/d	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1.3	Golongan IV/c	0	13	1	0	0	1	3	0	11	29
1.4	Golongan IV/b	0	12	29	4	0	132	10	7	11	205
1.5	Golongan IV/a	0	4	54	21	0	1072	8	14	30	1203
	JUMLAH GOLONGAN IV	2	30	84	25	0	1205	21	21	52	1440
2.1	Golongan III/d	0	0	40	224	2	172	91	35	71	635
2.2	Golongan III/c	0	0	6	146	1	184	83	52	80	552
2.3	Golongan III/b	0	0	0	102	6	276	106	47	273	810
2.4	Golongan III/a	0	0	0	7	0	203	199	26	326	761
	JUMLAH GOLONGAN III	0	0	46	479	9	835	479	160	750	2758
3.1	Golongan II/d	0	0	0	0	0	60	120	5	119	304
3.2	Golongan II/c	0	0	0	0	0	70	49	2	350	471
3.3	Golongan II/b	0	0	0	0	0	30	11	2	205	248
3.4	Golongan II/a	0	0	0	0	0	7	0	1	118	126
	JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	167	180	10	792	1149
4.1	Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
4.2	Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
4.3	Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
4.4	Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51
	TOTAL	2	30	130	504	9	2207	680	191	1645	5398

KET : Eselon I distandarkan
 Bupati dan Wakil Bupati

Muara Bungo, Desember 2017

BUPATI BUNGO

H. MASHURI

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA		
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL
1	2	3	4	5
4.05 . 4.05.02 . 54	<i>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</i> Seleksi Penerimaan CPNS Penempatan PNS Penataan Sistem Adm Kenaikan pangkat otomatis PNS Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Penyusunan Formasi PNS <i>Program Peningkatan Status Kepegawaian dan Kesejahteraan Pegawai</i> Pengelolaan Penetapan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Pemantau dan Evaluasi terhadap Pemberian Tanda Jasa bagi PNS Penetapan Identitas dan Penggajian Pegawai	131.667.000,00	798.967.000,00	0,
4.05 . 4.05.02 . 54 . 02		4.680.000,00	50.732.600,00	0,
4.05 . 4.05.02 . 54 . 03		41.266.000,00	446.204.500,00	0,
4.05 . 4.05.02 . 54 . 04		11.691.000,00	101.142.500,00	0,
4.05 . 4.05.02 . 54 . 09		53.670.000,00	59.906.200,00	0,
4.05 . 4.05.02 . 54 . 19		9.200.000,00	94.651.200,00	0,
4.05 . 4.05.02 . 54 . 20		11.160.000,00	46.330.000,00	0,
4.05 . 4.05.02 . 58		11.680.000,00	148.142.800,00	0,
4.05 . 4.05.02 . 58 . 03		6.280.000,00	71.837.000,00	0,
4.05 . 4.05.02 . 58 . 07		0,00	31.914.000,00	0,
4.05 . 4.05.02 . 58 . 08		5.400.000,00	44.391.800,00	0,

TELAH DITELITI OLEH :
KABID ANGGARAN

IMILDA SETIANA, SE, ME
NIP 19740805 200701 2 002
KEPALA BPJAD

Drs. SUPRIYADI, ME
NIP 19631015 198503 1 005


Muara Bungo, 28 C
BUPATI B

H. MASH

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
KASUBBAG PUV
TGL
HAMDA I. SH
NIP 19760415 200212 1 005
KABUPATEN
TGL
ALEK PURWENDI
NIP 19730706 2006

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 11 TAHUN 2017
TANGGAL 28 DESEMBER 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2018

KABUPATEN BUNGO
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN 2018

No.	URAIAN	TANGGAL DAN NOMOR PINJAMAN	POKOK PINJAMAN	PEMBAYARAN S/D 31 DESEMBER TAHUN INI	SISA PEMBAYARAN	KETERAN
1	2	3	4	5	6	7
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Muara Bungo, Desember 2017

BUPATI BUNGO

H. MASHURI

TELAH DITELITI OLEH :	
KABID ANGGARAN  IMILDA SEPTIANA, SE, ME NIP. 19741005 2007012 002	KEPALA BAKD  Drs. SUGENGADI, ME NIP. 19631015 198503 1 005

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU TGL  HAMBALI, SH NIP. 19760416 200212 1 005	KAB. MUKUM TGL  ALEK PURWENDI, SH NIP. 19730725 200003 1 1

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TANGGAL 28 DESEMBER 2017
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2018

KABUPATEN BUNGO
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGKARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2015 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2016		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2016 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2017		Jumlah sisa Anggaran Tahun
			APBD INDIK TA 2015	PERUBAHAN APBD TA 2015		APBD INDIK TA 2016	PERUBAHAN APBD TA 2016		APBD INDIK TA 2017	PERUBAHAN APBD TA 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah			-	-	-	-	-	-	-	-	-

TELAH DITELITI OLEH :

 KABID ANGGARAN (MILDA SEPTIANA, SE ME NIP. 19740505 2007012 002	 KEPALA BPJAD Drs. SUPRIYADI, ME NIP. 19631015 198503 1 005
--	---

Muara Bungo, Desember

 **BUPATI BUNGO**

 **H. MASHURI**

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

 KASUBAG PPU TGL HANISALLI, SH NIP. 19760416 200912 1 005	 KABAG PPU TGL ALEK PURWENDI, S NIP. 19730726 200603
---	--

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 11 TAHUN 2017
TANGGAL 28 DESEMBER 2017
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2018

KABUPATEN BUNGO
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2016 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2017		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2017 (Rp)	Jumlah s
				APBD INDUK TA 2016	PERUBAHAN APBD TA 2016		APBD INDUK TA 2017	PERUBAHAN APBD TA 2017		
1	PDAM Kab Bungo	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Muara Bungo	Rp1,500,000,000.00	Rp50,504,880,715.24	Rp52,004,880,715.24	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
2	PT.BANK JAMBI Kab Bungo	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Muara Bungo	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp943,615,028.00	Rp10,000,000,000.00	Rp10,943,615,028.00	
3	PT.BANK JAMBI Kab Bungo	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Muara Bungo	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
Jumlah										

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN :

TGL KASUBAG PUV
HAMBALI, SH
NIP.197604162002121005

TGL KABUP. BUKUM
ALEK PURWENDI, SH.MH
NIP.197307262000031003

TELAH DITELITI OLEH :

KABID ANGGARAN
IMILDA SEPTANA, SE.ME
NIP.197409052007012002

KEPALA BUKUM
Drs. SUPRIYADI, NE
NIP.196310151965031005

Muara Bungo, Desember 2017
BUPATI BUNGO
H. MASHURI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR R
1	2	3	4
4.05.4.05.02.07.01	Promosi Pembangunan Daerah	40.000.200,00	
4.05.4.05.02.07.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.200,00	
4.05.4.05.02.54	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	930.634.000,00	
4.05.4.05.02.54.02	Seleksi Penerimaan CPNS	55.412.600,00	
4.05.4.05.02.54.02.5.2.1	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
4.05.4.05.02.54.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.732.600,00	
4.05.4.05.02.54.03	Penempatan PNS	487.470.500,00	
4.05.4.05.02.54.03.5.2.1	Belanja Pegawai	41.266.000,00	
4.05.4.05.02.54.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	446.204.500,00	
4.05.4.05.02.54.04	Penataan Sistem Adm Kenalkan pangkat otomatis PNS	112.833.500,00	
4.05.4.05.02.54.04.5.2.1	Belanja Pegawai	11.691.000,00	
4.05.4.05.02.54.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.142.500,00	
4.05.4.05.02.54.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	113.576.200,00	
4.05.4.05.02.54.09.5.2.1	Belanja Pegawai	53.670.000,00	
4.05.4.05.02.54.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.906.200,00	
4.05.4.05.02.54.19	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	103.851.200,00	
4.05.4.05.02.54.19.5.2.1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	
4.05.4.05.02.54.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.651.200,00	
4.05.4.05.02.54.20	Penyusunan Formasi PNS	57.490.000,00	
4.05.4.05.02.54.20.5.2.1	Belanja Pegawai	11.160.000,00	
4.05.4.05.02.54.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.330.000,00	
4.05.4.05.02.58	Program Peningkatan Status Kepegawaian dan Kesejahteraan Pegawai	159.822.800,00	
4.05.4.05.02.58.03	Pengelolaan Penetapan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS	78.117.000,00	
4.05.4.05.02.58.03.5.2.1	Belanja Pegawai	6.280.000,00	
4.05.4.05.02.58.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.837.000,00	
4.05.4.05.02.58.07	Pemantau dan Evaluasi terhadap Pemberian Tanda Jasa bagi PNS	31.914.000,00	
4.05.4.05.02.58.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.914.000,00	
4.05.4.05.02.58.08	Penetapan Identitas dan Penggajian Pegawai	49.791.800,00	
4.05.4.05.02.58.08.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
4.05.4.05.02.58.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.391.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.851.128.673,00)	

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN:

KASUBBAG PUV

TGL

HAMBALI, SH

NIP. 19750416 200212 1 005

KABID HUKUM

TGL

ALEK PUJWENDI, SH, MH

NIP. 19730726 200603 1 003

TELAH DITELITI OLEH:

KABID ANGGARAN

TGL

IMILDA SEPTIANA, SE, ME

NIP. 19740905 200701 2 002

KEMPA BRKAD

TGL

Drs. SUPRIYADI, ME

NIP. 19631015 198503 1 005

Muara Bungo, 28 Desember 2019

BUPATI BUNGO

H. NASHURRI

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG				BELANJA LANGSUNG		
		PEGAWAI		NON PEGAWAI		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL
		1	2	3	4	5	6	7
06	1 04	Perumahan dan Kawasan Pemukiman		3.940.877.080,00	0,00	1.268.885.000,00	9.393.068.900,00	2.825.000.000,00
07	KESEHATAN							
07	1 02	Kesehatan		75.254.189.476,00	0,00	12.868.872.000,00	108.871.149.528,00	55.543.510.459,00
07	2 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		75.254.189.476,00	0,00	12.799.984.000,00	104.256.365.578,00	54.348.510.459,00
08	PARIWISATA DAN BUDAYA							
08	2 16	Kebudayaan		0,00	0,00	5.156.471.000,00	2.600.642.260,00	1.305.958.650,00
08	3 02	Pariwisata		0,00	0,00	5.156.471.000,00	2.112.268.760,00	50.000.000,00
10	PENDIDIKAN							
10	1 01	Pendidikan		285.094.751.287,00	0,00	3.169.965.000,00	44.240.190.565,00	24.649.874.375,00
10	2 13	Keperguruan dan Olah Raga		280.908.857.363,00	0,00	2.234.181.000,00	41.798.369.825,00	22.686.754.375,00
10	2 17	Perpustakaan		2.847.417.971,00	0,00	495.262.000,00	1.654.554.640,00	1.895.370.000,00
11	PERLINDUNGAN SOSIAL							
11	1 06	Sosial		1.338.475.953,00	0,00	440.522.000,00	787.266.100,00	67.750.000,00
11	2 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		9.982.827.319,00	0,00	1.660.354.500,00	4.018.679.490,00	147.650.000,00
11	2 06	Administrasi Kependudukan dan Sipil		6.731.374.911,00	0,00	701.528.500,00	1.496.699.810,00	0,00
				0,00	0,00	190.640.000,00	582.586.000,00	0,00
				3.251.452.408,00	0,00	768.186.000,00	1.939.393.680,00	147.650.000,00
				536.741.064.447,00	240.086.951.959,60	53.908.523.840,00	307.187.240.671,00	180.157.192.526,00

Muara Bungo, 28 D
BUPATI B

H. MASH

KABUPATEN ANGGARAN		KEPALA BUKU	
IMILDA SETIYANA, SE.ME		Drs. SUPRIYADI, ME	
NIP. 19740905 200701 2 002		NIP. 19631015 198503 1 005	

KASUBBAG PUU		KABUPATEN	
HAMDALI, SH		ALEK PURWEND	
NIP. 19760411 200212 1 005		NIP. 19730726 200	